

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERDA NO
10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
/KEBERSIHAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI**

By : Ovi Iriani

Email : ovi.irianiii@yahoo.com

Adviser : Dr. Harapan Tua RFS, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Levies are local taxes as payment for services or granting special permits provided and granted by the regional government for the benefit of individuals or bodies. A phenomenon that can be seen in the field, namely: 1. The collection of the levy exceeds a predetermined from tariff of local regulations No. 10 of 2012 concerning levy waste services / cleanliness. 2. Facilities and infrastructure is inadequate due to a lack of fleets. 3. Less irregular schedule due to lack of transport of the fleet. This study aims to find out what are the factors that affect the implementation of Regulation No. 10 Year 2012 on Service Fees Waste / Hygiene in Marpoyan Damai District in 2014.

This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The data source consists of primary data is data that is obtained from the Marpoyan Damai District. While secondary data is data sourced from the Marpoyan District documentation of Peace as well as revenue. The collection of data through observation, interviews and documentation. Analysis techniques of data is presentation of data analysis techniques, and drawing conclusions and testing.

The results showed that the order to determine the factors that inhibit the levy garbage / hygiene in the Marpoyan Damai district includes variables as follows: (1) The communication is meant process of delivering the policy objectives of retribution garbage from the District Marpoyan Peace by means of socialization to the community topdown. (2) Resources are defined in this study is for the overall financial and nonfinancial factors needed to carry out the organizational activities of the activities in the program districts fare collection and transportation of garbage. (3) Disposition referred to in this research is the attitude of the district head has shown firmness to the janitor in fare collection and transportation of garbage. (4) The structure of the bureaucratic point is the composition and the relationship between the unit and its functions and operational procedures within institutions related agencies working unit.

Keywords: public policy, policy implementation, public service

PENDAHULUAN

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Munawir,1980).

Fungsi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan apabila tidak membayar tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini telah diatur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65-66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat studi kasus tentang retribusi persampahan /kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai yang dimana Perwako melimpahkan wewenang kepada camat yang berada di Kecamatan Marpoyan

Damai. Pelimpahan wewenang dari Perwako tersebut terbagi atas 2 yaitu: yang pertama tentang retribusi dan pengelolaan sampah. SOP sampah dikecamatan Marpoyan Damai mengenai pengangkutan sampah dari rumah, ruko dan kantor yang langsung diangkut oleh petugas kebersihan kecamatan untuk dibawa ke TPA langsung.

Sistem pemungutan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai ini dilakukan setiap hari dengan sistem pemungutan perwilayah pada tiap Kelurahan. Dimana armada beroperasi 7 unit pada tiap harinya. Waktu pemungutan dilakukan pada subuh hari dan terkadang ada yang dilakukan pada malam hari dikarenakan armada yang tidak bisa difungsikan. Dan pengangkutan yang akan dibawa ke TPA dari TPS dilakukan pada siang hari pada setiap harinya. Tidak semua sampah bisa diangkut dikarenakan fasilitas seperti mobil pengangkut sudah tidak layak, tidak berfungsi dan bak mobil tidak mampu menampung jumlah sampah yang ada pada kecamatan marpoyan damai.

Tabel 1. Armada Pengangkut Persampahan di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Arma da	Ju ml ah Un it	Mua tan	Keteran gan
1	Cold Diesel (Roda 6)	6	4 Ton	1 Unit Rusak
2	L300 (Roda 4)	2	2 Ton	-

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Beribacara mengenai “kebijakan (*policy*)” hendaknya dibedakan dengan “kebijaksanaan (*wisdom*)”, meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang. Dengan demikian, yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah suatu kebijakan tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan.

Sementara itu menurut **Irfan Islamy (1998:17)** Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diakui dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut **Irfan Islamy (1998:25)** ada 5 faktor yang mempengaruhi kebijakan:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Implementasi Kebijakan

Meskipun penjelasan mengenai beberapa faktor yang membatasi atau menjadi kendala bagi berlangsungnya implementasi yang efektif adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, namun patut disayangkan hal itu ternyata tidak menghasilkan perkembangan teori yang signifikan mengenai implementasi kebijakan. Kendati demikian, kategori implementasi luas yang kedua berupaya mengembangkan teori (*analytical frame work*) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada terwujud atau tidak terwujudnya tujuan kebijakan yang telah digariskan.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi di konseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan, dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan. (Budi Winarno 2012:147).

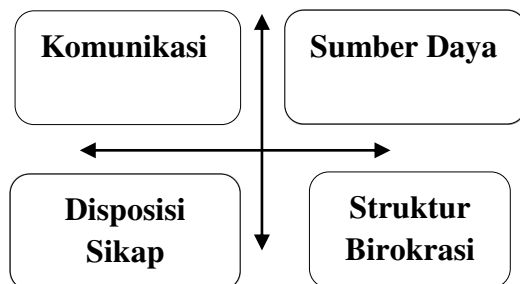
Menurut **Eugene Bardach dalam Leo Agustino (2008:138)** implementasi adalah

cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus dikertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpi dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Menurut Agustino (2008:25) Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut **George C. Edward III dalam Riant Nugroho (2014:226)** dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu yang utama : komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi.

Gambar 1. Model George Edward III



- a. Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat.
- b. Sumber daya adalah menyangkut ketersediaan khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif.
- c. Disposisi adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan. Disposisi adalah tentang komitmen lebih dari kompetensi dan kapabilitas.
- d. Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektifitas implementasi kebijakan.

Faktor-faktor keberhasilan implementasi menurut **Ripley dan Franklin dalam Sujianto (2008:46)** adalah:

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsensus diantar pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut.

2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
3. Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.

Apabila kelompok-kelompok penting dari mereka (kelompok sasaran) mempunyai tingkat konsensus yang tinggi untuk menentang implementasi, maka tidak mungkin implementasi dapat berhasil. Namun bila kelompok-kelompok penting tersebut berada pada satu pandangan dalam implementasi maka implementasi akan dibuat lebih mudah (Sujianto, 2008:47).

Sementara itu, **Grindle dalam Budi Winarno (2012:149)** juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa

dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Pelayanan Publik

Menurut **Tampubolon dalam Monang Sitorus (2009:55)** pelayanan adalah melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, pelayanan diartikan adanya pihak yang melayani disebut pelayanan, pihak yang dilayani disebut pelanggan, dan terjadi proses melayani-dilayani atau memberi-menerima.

Menurut **Kotler (2002:83)** definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen itu sendiri.

Pelayanan tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung pelayanan umum yang penting peranannya. Menurut **Moenir (2006:82)** terdapat faktor-faktor yang mendukung pelayanan umum :

1. Faktor kesadaran

Yaitu suatu proses berfikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketepatan hati dan keseimbangan dalam jiwa sebagai

pangkal tolak untuk perbuatan dengan kata lain, faktor kesadaran disini merupakan kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam tugas pelayanan. Kesadaran para pegawai pada segala tingkatan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat membawa dampak yang sangat positif terhadap organisasi ini akan menjadi kesungguhan dan disiplin melaksanakan tugas, sehingga hasilnya dapat diharapkan melalui standar yang telah ditetapkan.

2. Faktor aturan

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Oleh karena itu peranan aturan demikian besar dalam hidup bermasyarakat maka dengan sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran dengan maksudnya. Aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja pelayanan. Aturan ini mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah. Oleh karena itu harus dipahami organisasi yang berkepentingan/bersangkutan. Setiap aturan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung kepada orang, maka masalah manusia serta sifat kemanusiaannya harus menjadi pertimbangan utama.

3. Faktor organisasi

Merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha pencapaian tujuan. Organisasi yang dimaksud disini adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.

4. Faktor pendapatan

Yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan merupakan seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk yang, aturan maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan yang cukup akan memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik.

5. Faktor kemampuan keterampilan

Yaitu kemampuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan pekerjaan. Ada tiga kemampuan yang harus dimiliki, yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis dan kemampuan membuat konsep. Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat.

6. Faktor sarana

Yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Sarana ini meliputi peralatan, perlengkapan, alat bantu dan fasilitas lain yang melengkapi seperti fasilitas komunikasi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah riset (Umar 2002:208). Untuk menemukan dan memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sebuah kerangka berfikir dari teori yang menjadi pokok pikiran dalam mendiskripsikan masalah yang akan diteliti sehingga tidak melenceng.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori George Edward III sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini tidak melenceng. Dalam konteks ini agar mendapatkan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan dalam penulisan yang artinya pokok dalam bahasan selanjutnya, dengan maksudnya ini agar dapat memberi arahan dalam penulisan itu sendiri.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George Edward III, ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang dimaksudkan adalah

Proses penyampaian tujuan kebijakan retribusi sampah dari Kecamatan

Marpoyan Damai dengan cara sosialisasi kepada masyarakat secara *topdown*.

- b. Sumber daya adalah menyangkut ketersediaannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Sumber Daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk keseluruhan faktor finansial dan nonfinansial yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas keorganisasian dari kegiatan kecamatan dalam program pemungutan tarif serta pengangkutan sampah .
- c. Disposisi adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan. Disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap dari Camat sudah menunjukkan ketegasan kepada petugas kebersihan dalam pemungutan tarif serta

- pengangkutan sampah.
- d. Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektifitas implementasi kebijakan. Maksudnya adalah susunan dan hubungan antar unit dan fungsi serta prosedur operasional didalam institusi satuan kerja instansi terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara Eksplorasi/Eksploratif yaitu merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai suatu topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh peneliti atau suatu yang menarik perhatian dan belum dipahami dan belum dikenali dengan baik.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu di Kantor Camat Marpoyan Damai, dengan pertimbangan bahwa dalam implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum sesuai dengan perda yang ada.

Informan penelitian

Penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber

informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai. Setelah data terkumpul dari setiap informan penelitian kemudian menggunakan metode triangulasi dengan *cek and cross cek* terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian.

Dalam penelitian ini mengandalkan informasi dan nara sumber yang disebut informan penelitian. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang berarti dipilih berdasarkan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi terkait dengan data-data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai

Dalam bab ini penulis dan menganalisa data-data yang yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dikantor camat Marpoyan Damai yang berhubungan dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 ini dibuat bertujuan agar pengelolaan tentang retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan di setiap kecamatan yang ada di kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan isi dari peraturan tersebut yang nantinya akan mengoptimalkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di masing-masing kecamatan. Dimaksudkan agar PAD setiap kecamatan dapat bertambah setiap tahun atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi persampahan/kebersihan dapat terlaksana. Implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan setelah satu kebijakan pemerintah dirumuskan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk kebijakan. Sedangkan implementasi kebijakan tentang retribusi persampahan/kebersihan adalah rangkaian setelah kebijakan mengenai retribusi dirumuskan, implementasi kebijakan ini juga dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan yang telah di desain dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh George C. Edward.

Dalam bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi yang dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai guna mengetahui

faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam retribusi persampahan/kebersihan dan faktor-faktor yang menghambat dalam retribusi persampahan/kebersihan.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dalam retribusi persampahan/kebersihan dan faktor-faktor yang menghambat dalam retribusi persampahan/kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai, penulis menggunakan teori George C. Edward III yaitu pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari yang menanyakan apakah prakondisi untuk kebijakannya yang berhasil. Untuk itu dipertimbangkan faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik.. Penulis meneliti yang meliputi variabel-variabel sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Komunikasi

Komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik, ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dimaksud adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan dengan melakukan

komunikasi yang baik, sehingga keefektifan implementasi akan terlaksana.

Komunikasi bisa juga merupakan alat pengiriman atau penyampaian perintah-perintah atau arahan informasi bertujuan menghasilkan dampak yang merupakan aspek kognisi maupun afeksi. Ketidakjelasan perintah dan arahan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan akan memberikan pelaksanaan dilapangan pada situasi yang tidak pasti dalam mengimplementasikan kebijakan. Ini juga berarti menghadapkan para pelaksana dalam keadaan kesukaran dalam mengirimkan perintah dan arahan kepada kelompok sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan kegiatan dengan demikian pula dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksananya, konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Hubungan komunikasi dengan implementasi tidak hanya dilihat dari lancar atau tidaknya pengiriman atau penyampaian perintah dan arahan pelaksana memberikan informasi kepada kelompok sasaran saja secara nyata kepada mereka-mereka yang akan melaksanakan program.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Implementasi berjalan dengan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Ketidak jelasan perintah atau arahan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan dan memberikan pelaksana dilapangan pada situasi yang tidak pasti dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari masing-masing pelaksana lapangan.

Kejelasan perintah dan arahan menugundang maksud kekhususan tentang apa yang harus dihasilkan oleh pelaksana bagaimana mencapai hasil tersebut. Untuk mencapai hasil atau tujuan yang dirumuskan dalam ukuran-ukuran yang jelas dan tepat. Dengan demikian, para pelaksana dapat mengetahui dengan jelas apa yang dikerjakan.

Implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi sehingga kebijakan akan berjalan dengan efektif dan menghindari kontradiksi perintah untuk melaksanakan kebijakan. Konsistensi perintah dan arahan para pelaksana akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan yang diharapkan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personal dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Sumber Daya

Implementasi memerlukan sumber daya yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya, implementasi akan banyak mengalami suatu kegagalan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi itu

berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Sumber daya yang dimaksud mencakup staff yang memadai dengan keahliannya, fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan sesuai yang diharapkan serta wewenang atau kewenangan.

Dukungan fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan (sarana dan prasarana). Selain sumber daya berupa staff, dukungan pelaksana yang tidak kalah pentingnya ada sumber daya wewenang, sebab dengan adanya pelimpahan tersebut pelaksana dapat mengimplementasikan secara efektif. Para pelaksana merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan itu pasti memerlukan dukungan staff yang memadai. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah yang di embankan atau tanggung jawab maupun kemampuan dan keterampilan yang dimiliki baik secara teknis maupun manajerial.

Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana kebijakan dari pemerintah. Pemerintah harus memiliki watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagai aparat pemerintahan harus adanya pemahaman atau konsistensi yang sama tentang isi kebijakan dan pelaksana kebijakan, adanya itikad baik dari masyarakat dan tanggung jawab masyarakat untuk menaati aturan, adanya pemahaman yang

sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Sikap disini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator didalam bertindak. Hal ini berkembang sebagai tindakan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pada pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red /tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi-organisasi tidak fleksibel.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur kelembagaan yang mendukung terlaksananya kebijakan sehingga tidak ada yang merasa dipersulit dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, struktur kelembagaan yang berjalan dengan baik merupakan syarat mutlak untuk kebijakan pemerintah yang efektif. Struktur adalah upaya untuk menata atau memanajemenkan sebuah pekerjaan dengan baik agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Struktur birokrasi sangatlah berpengaruh didalam terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana penilaian dari suatu organisasi sangat mempengaruhi dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda no 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kecamatan marpoyan damai, dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi terkait sudah berjalan namun hasilnya belum maksimal. Dari keempat faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai :

1. Komunikasi yang belum optimal dikarenakan masih adanya komunikasi yang kurang lancar antara pihak kecamatan dan masyarakat. Yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui dengan jelas mengenai Peraturan Daerah tersebut.
2. Sumber daya yang dimiliki masih kurang memadai karena keterbatasan armada dan para pelaksana kurang berkompeten dibidang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Aparat pemerintahan mempunyai kemampuan pemahaman atau konsistensi yang sama tentang isi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, adanya etiket baik dari masyarakat dan tanggung jawab masyarakat untuk mentaati aturan, adanya pemahaman yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Dan para petugas pemerintahan harus memiliki beberapa sikap yang betul-betul menunjukkan bagaimana bekerja sesuai aturan dan sikap profesional sebagai seorang aparat pemerintahan atau petugas disaat bekerja agar terwujudnya nilai-nilai positif dimata masyarakat.
4. Tugas yang dipegang para petugas yang diutus

kelapangan oleh pemerintah tentunya petugas itu mempunyai tugas yang jelas sesuai dengan apa yang ditetapkan, pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas dilapangan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena peraturan yang dijelaskan pemerintahan tidak jelas dalam penyampaian tidak sesuai antara peraturan yang tertulis di Perda No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan walaupun sudah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan kesimpulan diatas yang paling berpengaruh dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan yaitu Sumber daya. Karena Implementasi memerlukan sumber daya yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya, implementasi akan banyak mengalami suatu kegagalan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi itu berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Sumber daya yang dimaksud mencakup staff yang memadai dengan keahliannya, fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan sesuai yang diharapkan serta wewenang atau kewenangan.

Dan yang paling rendah pengaruhnya terhadap Perda No 10 Tahun 2012 yaitu Struktur Birokrasi

karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap struktur dari pemerintah maupun para pelaksana kebijakan.

4.1. Saran

Dari kesimpulan yang telah dirumuskan maka penulis memberikan saran yaitu seharusnya pihak kecamatan mengelola pelayanan persampahan /kebersihan dengan baik, yaitu :

1. Disarankan kepada aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Disarankan aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai agar menambah sumber daya seperti fasilitas, sarana dan prasana agar berjalannya sesuai peraturan.
3. Disarankan kepada aparat pemerintahan untuk melakukan pelatihan agar memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap Peraturan Daerah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat.
4. Disarankan kepada aparat pemerintah yang bertugas dilapangan, melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan publik. Jakarta: Salemba Humnika
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung: CV. Alfabeta
- Abdul wahab, Solichin, 2012. Analisis kebijakan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Dunn, W.N. 2003. Pengantar analisis Kebijakan Publik, Gadjara Mada university press, Yogyakarta
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Media Group
- Madani, Muhlis, 2011. Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ruslan, Rosady. 2005. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta:
- Setyawan salam, Dharma. 2004. Otonomi daerah, Jakarta: Sapdodadi
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Bandung. Alfabeta..
- Suharto, Edi. 2010. Analisis kebijakan publik. Bandung: Alfabeta
- Sujianto, 2008. Implementasi kebijakan publik. Alfabeta Riau. Pekanbaru
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Abdul. 2004. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta. Citra Uama
- Wibowo, Samodra. 2011. Politik perumusan kebijakan publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo : Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan publik (Teori, proses dan studi kasus). Yogyakarta: Caps

Sumber Lain :

<http://gagasanriau.com/camat-marpoan-damai-langgar-perda-pungut-retribusi-sampah-rp-30-ribu/>

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah